



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan ;
- b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017, telah dialokasikan anggaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748) ;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
  10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya
7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB II**

### **AZAS**

#### **Pasal 2**

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan atas azas :

- a. Azas Kepatutan ; yaitu mempertimbangkan bahwa Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD apabila disewakan.
- b. Azas Berjenjang ; yaitu Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD, dan Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua DPRD serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- c. Azas Kewajaran ; yaitu pembayaran Tunjangan Perumahan harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya Tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan.

- d. Azas Rasionalitas ; yaitu pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan bahwa besarnya Tunjangan Perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan dan / atau rumah dinas Anggota DPRD.

### **BAB III**

#### **BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk lumpsum yang dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2017.

##### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sesuai Standar Satuan Harga Sewa yang berlaku umum.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- / bulan
  - b. Wakil Ketua DPRD (2 orang) @ sebesar Rp.5.000.000,- / bulan
  - c. Anggota DPRD,(22 orang) @ sebesar Rp. 3.350.000,- / bulan
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mobiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

### **BAB IV**

#### **PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 3 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

**LELI ARNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 1



